

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sunyoto, 2004. *Hutan Gundul, Siapa Suka Siapa Duka*. Yogyakarta: Resist.
- Agus Budianto, 2012. *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: CV.Karya Putra Darwati,
- Alvi Syahrin, Martono Agusti dan Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*. Medan: Prenadamedia Group.
- Andi Muh. Sofyan dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- , dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*, (edisi ketiga), Jakarta: Kencana.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education& PUKAP – Indonesia, hlm. 26.
- Andi Muh. Yunus Wahid, 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Agustinus Herimulyanto. 2019. *Sita Aset Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Insitute of Criminal Justice Reform (ICJR).
- Cambridge *Advanced Learner's Dictionary*, (edisi ketiga). Cambridge University Press. 2008. ISBN 978-0-521-85804-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 August 2009.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Darwan Prints, 2001. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- E. Utrecht, 1960. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM) Press.

- Eddy O.S. Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- , 2015. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- , 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni.
- , 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Stora Grafika.
- Garner, B.A., 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Dallas Texas: West Group.
- Gregor Polancik, 2009. *Empirical Research Method Poster*. Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1982. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herbert L. Packer, 1986. *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford-California, Stanford University Press,
- I Made Widnyana, 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Total Media.
- Imam Supardi, 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni.
- Irawan Harahap, 2018. *Aspek Pidana dalam Hukum Kehutanan*, Paper Auditor. Hukum.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 2, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Joko Sriwido, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia; Teori dan Praktik*, Jakarta: Kepel Pres.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Bagian Kedua Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yasir Said dan Irfani, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusa Media.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2011. *Hukum Panitensier*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Masruchin Ruba'i, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muhari Agus Santoso, 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press
- Mas Achmad Santosa, 2011. *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL.
- Naim, Afriyandi.R. 2013. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks KUHP*. Makassar: Kencana.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, edisi revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prayudi, Guse, 2012. *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata*. Yogyakarta: Tora Book.
- Priyantno, H. Dwija. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- R. Sugandhi, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- R. Soesilo, 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*. Bogor: Politea.
- Rahmi Hidayati D, dkk, 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Tangerang: Wana Aksara.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hantijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Salim H.S, 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Salim, P, 1987. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Jakarta: Modern English Press.
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- , 1983. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soejono, 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Tanpa Tahun, Bandung,
- Sukardi, 2003. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus. Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Suriansyah Murhaini, 2011. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Suyono, 2013. *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: EGC Qurratur R. Estu Tiar.
- Sutherland & Cressey, 1974. *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, terjemahan dari buku asli, "The Control Crime" Terjemahan Sudjono D. Tarsit, Jakarta: Pustaka Utama.
- Takdir Rahmadi, 2016. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Banjarmasin: Unila.
- Van Apeldoorn. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet XXIV. Terj. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yasir Said dan Ifrani. 2019. *PIDANA KEHUTANAN INDONESIA: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusamedia.
- Y. Susilo dan Eko Budi, 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan*, Malang: Averroes Press.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press.

- A.M.Yunus Wahid dkk, (2021). *Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*, artikel dalam AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 24, No.1.
- Aisah. (2015). *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV. No. 1.
- Andri G. Wibisana,. (2016). *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia*". Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 46. No. 2.
- Eva Syahfitri Nasution. (2015).. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Mercatoria, Vol. 8. No. 2.
- Gede Made Dananda Paramartha Susila. (2022). *Pengaturan Pidana Denda Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kertha Wicara, Vol 11 No..2.
- Hady P. Putera. (2016). *Gagasan Penerapan Vicarious Liability Dalam Konsep KUHP Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 2. No.1.
- Mompang Pangabea. (2013). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013*. Jurnal Dictun. Vol.12. No.1.
- Sakeus Ginting. (2010). *Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 1. No. 1.
- Susanti, Dwi Siska, Nadia Sarah, Nurindah Hilimi. (2018). *Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan*. Jurnal Integritas. Vol 4, No.2
- Syarifah Fardhani Sri Purwaningsih,. *Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan Yang Sudah Inkracht*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.
- Achmad Ali, *"Sumbangan Pemikiran tentang Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia"*. Makalah pada seminar Revitalisasi Nilai-Nilai Kejuangan Membangun Indonesia yang Maju, Sejahtera dan Berkarakter, (Bandung pada tanggal 21 Juni 2008).
- Bachtiar Marbun, 2021. *Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.1.No. 13.
- Fathi Hanif, 2015. *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2. Issue 2.
- Ferdricka Nggeboe, 2012, *Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP*, Jurnal LEGALITAS, Volume II Nomor 1.
- G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana Dan Tindakan "Double*

- Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012)
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2010. *Eksistensi Pidana Denda Di Dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19 .
- Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, 2022, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus. Vol. 7 No. 2.
- Jo. Carrillo, 2007. *Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman*, Southern California Interdisciplinary Law Journal 17
- Joel Waldfogel, 1995. *Are Fines and Prison Terms Used Efficiently? Evidence on Federal Fraud Offenders*, Journal of Law and Economics, Volume 35.
- Muzakir Salat. 2012. *Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41. No. 1.
- Ovien Marisca dan Yeni Widowaty, 2018. *Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Holiday Resort di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Hukum NOVELTY, Vol. 9 No. 1.
- R. Tony Prayogo. 2016. “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02.
- Reda Manthovani, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan oleh Korporasi*, hal 4. Dikutipdari:
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/PENUNTUTAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20DALAM%20KEJAHATAN%20DI%20SEKTOR%20KEHUTANAN.pdf>.
- Sally S.Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 *Advances in Criminological Theory*, 171 (1993)
- Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi*, JURNAL HUKUM Vol. 17. No. 2.
- Steven D. Levitt, 1997. *Incentive Compatibility Constraints as an Explanation for the Use of Prison Sentences Instead of Fines,* International Review of Law and Economics, Volume 17.
- Tata Wijayanta. 2014. “*Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*

*Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal
Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2.*

Totok Dwi Diantoro, *Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman
Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, 2011, hal. 551.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pascaamandemen;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Kehutanan);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Bukan Pajak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNPB Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 TAHUN 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER – 028/A/JA/10 /2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Laporan-Laporan

“Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Pengelolaan Kehutanan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 2022.

“Laporan Tahun 2021”, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Jakarta, 2022.

Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda, Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda, BPHN Dep. Keh. RI. 1992, Jakarta.

“Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penyelamatan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan”, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2017.

“Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan, Perangkat Analitis”, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dengan dukungan dari anggota International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICWC), yaitu Sekretariat Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), International Criminal Policy Organization (INTERPOL), Bank Dunia dan World Customs Organization (WCO).

“Statistik 2022”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2022.

Surat Kabar dan Internet

Ainal Mardhiah, “Mengetahui Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dikutip dari;
<https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html>.

Hariadi Kartodihardjo, “Perpu Illegal Logging: Kerusakan Hutan Dalam Kebijakan Simtomatik”, Majalah Hutan Indonesia , Edisi No. 28/Juni 2004.

“Memutuskan Mata Rantai Illegal Logging”, Ozon, Desember 2003.

“Nasib Hutan Indonesia di Ujung Tanduk”, Forest Watch Indonesia, 20/01/2024. <https://fwi.or.id/nasib-hutan-indonesia-di-ujung-tanduk/>
<https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>.

“Kebijakan Pengaturan Pengelolaan Piutang PNPB Pada Kementerian/Lembaga”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-pengaturan-pengelolaan-piutang-pnpb-pada-kementerianlembaga>,

<https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/26803/Ringkasan%20Disertasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
<https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/HAMBATAN-DALAM-PENEGAKAN-HUKUM-PIDANA-PADA-PENGELOLAAN-HUTAN-DI-INDONESIA> Desertasi Sadino.pdf
<https://repository.unissula.ac.id/12157/>.

“Convention on International Trade of Endangered Species,” 3 Maret 1973, United Nations Treaty Series, Vol. 993 (1973).

Webinar bertema “Penguatan Kebijakan Pencegahan Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar di Indonesia Berbasis Daring”, diselenggarakan Departemen Kriminologi FISIP UI bersama-sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK dan Wildlife Conservation Society Indonesia (12/10/2022).

“Convention on International Trade of Endangered Species,” 3 Maret 1973, United Nations Treaty Series, Vol. 993 (1973).

IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4, <http://www.iucnredlist.org>, diunduh pada 29 Mei 2024.

<https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Tulisan-Hukum-Pengendalian-Kebakaran-Hutan-Lahan-Berdasarkan-Peraturan-Perundang-Undangan-NETT.pdf>.

“Langkah Pemerintah Usai Kasasi Karhutla Kandas, SPK Atau Patuhi Putusan”, liputan6.com (3/09/2019).

“Berbagai Kerugian Yang Diderita Indonesia Akibat Kebakaran Hutan”, sains.kompas.com (18/09/2019) pukul 19:00 WIB. diakses 10 Juni 2024.

<https://nationalgeographic.grid.id/read/131856895/ini-beragam-kerugian-yang-dialami-indonesia-akibatkebakaran-hutan?page=all>, diakses 10 Juni 2024.

“Protes Kabut Asasp Malaysia Gunakan Data Pusat Meteorologi Khusus

Arean” kabar24.bisnis.com (12/09/2019)

“Perambahan Hutan Paling Banyak Terjadi di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera”, mediaindonesia.com (29/3/2023) pukul 16:03 WIB.

“Darurat Pengelolaan Sampah di Indonesia”, kompas.id (28/07/2023) pukul 11:05 WIB.